

MATRIK LEMBARAN KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NO	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi Perioritas/Kegiatan /indikator	Baseline Data	Indikator Kinerja
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggungjawaban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan	<p>1. Akses : Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh.</p> <p>2. Partisipasi : Rumusan kegiatan penyusunan APBD dan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender.</p> <p>3. Kontrol : Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat .termasuk isu gender) masih</p>	1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius.	Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh .	1. Terakomodirnya kegiatan yang responsif Gender pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah agar rancangan Perda dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.	1. Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.	<p>Rumusan Kinerja Output : Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>Indikator kinerja Output : Tercapainya penetapan APBD tepat waktu</p>	<p>Rumusan Kinerja Output : 1. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender. 2. Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh.</p> <p>Indikator kinerja Output : 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS. 2. Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran APBD</p>

	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NO	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi Perioritas/Kegiatan /indikator	Baseline Data	Indikator Kinerja
		Tidak adanya pemisahan sumber dana yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi perempuan.	2.Rumusan kegiatan penyusunan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender.	2.Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh		2.Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	2.Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender.		
		Tidak adanya jumlah kegiatan yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.	3.Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan APBD Kota Payakumbuh.				3.Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh.		
							4.Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh).		

	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NO	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi Perioritas/Kegiatan /indikator	Baseline Data	Indikator Kinerja
							5.Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan APBD TA 2023.		
							6.Penjabaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan APBD TA 2023 di rinci untuk masing-masing kegiatan OPD dengan menyusun DPPA SKPD Tahun 2022 dan DPA Tahun 2023		

Payakumbuh, Maret 2023
An. KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001

MATRIK LEMBARAN KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

SUB KEGIATAN : KOORDINASI & PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NO	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator Kinerja
1.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggungjawaban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan	1.Akses : Pemahaman pelaksana pembuat laporan keuangan SKPD yang belum merata sehingga perlu dilakukan pembinaan agar meratanya informasi peraturan terkait pengelolaan keuangan;	1.Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius;	1.Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh;	Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.	1. Melaksanakan pembinaan berupa bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan terhadap pelaksana yang responsif gender	Input : 1. Guiden atau tutorial dari pemerintah pusat 2. Narasumber atau mentor 3. Peserta pembuat laporan keuangan	Rumusan Kinerja : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun setiap penggunaan anggaran pembangunan yang menjadi kewenangan SKPD sebagai pengguna anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Indikator Kinerja : 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dan dicantumkan pada kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD. 2. Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh.
			2.Partisipasi : Seluruh OPD mengikuti pembinaan yang dilaksanakan;	2.Tenaga yang memberikan pembinaan didominasi oleh perempuan.	2.OPD mengirimkan SDM yang tersedia dan mau melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tanpa memperhatikan atau responsif gender.	2.Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	2.Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender.	Output : 1. Terlaksananya pembinaan 2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Tersedianya Rancangan Perda dan Rancangan Perwako tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NO	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator Kinerja
			3.Kontrol : Keterbatasan kapasitas SDM dengan latar belakang gender dan kondisi peraturan yang berubah ubah dalam kurun waktu berdekatan;				3.Kegiatan yang telah dihimpun akan masuk ke dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh.		
			4.Manfaat : Terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.						

Payakumbuh, Maret 2023
An. KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001